



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO. 59 BANDUNG 40123

Nomor : S-168/WPB.13/2020 14 April 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Secara Online

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup Kantor Wilayah Ditjen  
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

- 1 Kawil Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Money PA) satker di tingkat regional. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyampaikan kuesioner pelaksanaan anggaran dan konfirmasi kepada satker dalam kegiatan *Focus Group Discussion* maupun Unit Revisi Cepat.
- 2 Sesuai Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-25/PB/2020 hal Tindak Lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 kegiatan yang memerlukan penyelesaian/koordinasi secara tatap muka, dapat dialihkan dengan mengoptimalkan penggunaan IT.
- 3 Terkait dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-289/PB.2/2020 tanggal 23 Maret 2020 hal Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN bahwa penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut. Namun demikian, satker diminta agar tetap menjaga tata kelola keuangan dan menyampaikan dokumen/laporan yang terkait dengan IKPA.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan Money PA secara *online*. Satker diminta untuk mengisi survey dan menyampaikan kendala serta permasalahan pelaksanaan anggaran yang dihadapi termasuk dampak adanya kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Kegiatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 dengan mengakses <http://bit.ly/KuesionerDigitalMoneyPA> paling lambat tanggal **20 April 2020**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Perbendaharaan Provinsi  
Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik  
Sahat M.T. Panggabean

